

BAB V KESIMPULAN

Kongsi-kongsi di pulau Pramuka telah sampai pada suatu fase di mana setiap kongsi melakukan pengamatan terhadap kongsi lainnya, dan membuat strategi baru untuk mengungguli kongsi lainnya. Namun ini hanya dilakukan sejauh tidak merubah sistem bagi hasil yang telah ada. Secara umum, setiap kongsi berusaha untuk menunjukkan keunggulan kongsinya dan menunjuk kelemahan kongsi lainnya.

Keberadaan anak buah sebagai bagian dari kongsi bukan lagi suatu kondisi yang dapat dianggap sebagai suatu kewajaran, tapi harus diupayakan. Artinya, baik dari pihak bos maupun anak buah, dalam porsinya masing-masing telah mengetahui pentingnya posisi mereka dalam kongsi. Oleh karena itu, menciptakan kondisi nyaman menjadi tujuan bos dan juragan kongsi. Sementara dari pihak anak buah, selain kondisi nyaman, mereka juga menginginkan adanya perubahan aturan yang terkait dengan penghasilan. Selain itu, anggapan bahwa mempekerjakan anak buah yang orang pulo asli adalah lebih baik, tidak dapat dipungkiri. Karena ini menjadi pengakuan tidak langsung, kalau kongsi yang bersangkutan disukai oleh warga pulo. Sementara bagi yang anak buahnya dari kongsi lain, diasumsikan, tidak diminati oleh orang pulo sendiri.

Bos yang merupakan pemilik usaha kongsi menjadi salah satu penentu dari keutuhan kongsi. Pilihan untuk melakukan ikut melibatkan diri atau tidak dalam operasional kongsi tidak dilakukan oleh semua bos kongsi dengan pertimbangan berbeda-beda. Cara bos dalam membangun kepercayaan anak

buah, atau antar anak buah dengan juragan juga menjadi salah satu pilar penting tetap berdirinya sebuah kongsi. Selain itu, yang juga tak kalah penting, kebijakan pengelolaan keuangan, di mana biasanya istri bos sangat terlibat menjadi kekuatan atau kelemahan suatu kongsi.

Juragan, yang merupakan sosok terpenting dalam operasional kongsi, adalah mediator antar anak buah dan juga antar anak buah dengan bos. Oleh karena itu, menurut hampir semua bos maupun anak buah, juragan yang berkarisma adalah juragan yang ditakuti oleh anak buah sekaligus bosnya. Karena juragan yang memiliki kunci untuk menjalankan operasi harian kongsi.

Sejarah kongsi di pulau Pramuka, menunjuk juga pada sejarah para pelakunya. Dari awal telah diceritakan, bahwa anak buah kongsi yang ada saat ini, dulunya rata-rata pernah bekerja sebagai nelayan ikan hias dengan menggunakan potas, dan sebagian kecil juga pernah menjadi nelayan kongsi untuk bos dari pulau Panggang (H. Juli). Perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu menunjukkan adanya pengaruh ekonomi, politik dan sosial yang terjadi di pulau Pramuka. Misalnya, potas digunakan oleh warga pulau Pramuka karena ada yang membawanya pada jaman tersebut, dan pasar yang permintaannya besar. Ketika potas tidak lagi dihentikan, bukan karena kesadaran, tapi karena Pemerintah melakukan tindakan tegas menangkapi para nelayan yang menggunakan potas. Peralihan menjadi kelompok kongsi rupanya dianggap sebagai usaha yang saat ini paling cocok, karena secara biaya dan efisiensi, usaha ini masih dapat menghidupi seluruh anggota kelompoknya secara layak.

Keabsenan institusi yang mengatur pemanfaatan sumberdaya antar nelayan di pulau Pramuka, tidak membuat orang pulo harus khawatir akan

kehilangan sumberdayanya dalam waktu dekat. Dari data yang didapat, terbukti hasil dari nelayan kongsi dari 6 tahun terakhir tidak menunjukkan penurunan, bahkan tahun ini ada peningkatan signifikan. Meskipun tidak menganut prinsip konservasi, orang pulo sangat meyakini rejeki diatur oleh Tuhan. Oleh karenanya, selama pencarian ikan masih dilakukan di dalam wilayah Kepulauan Seribu, tidak ada target minimal. Mereka yakin jika hari ini rejekinya sedikit, maka mungkin besok Tuhan akan memberikan jatah rejeki yang lebih baik.

Keyakinan akan Tuhan sebagai institusi pengatur, agaknya terlalu dini jika dikaitkan dengan nilai keagamaan yang dianut warga pulo. Tuhan, sebagai institusi pengatur merupakan keyakinan warga pulo sebagai refleksi dari ketidakberdayaan mereka mengatur laut sebagai sumberdaya yang memuat rejeki. Kondisi laut yang tidak dapat diramalkan, termasuk cuacanya, membuat warga pulo, khususnya nelayan mengakui keterbatasannya dalam pengelolaan sumberdaya tersebut. Oleh karena itu, mengikuti sistem agama yang diyakininya, di mana kekuasaan tertinggi adalah Tuhan, menjadikan Tuhan dijadikan institusi pengatur yang menentukan rejeki mereka di laut. Selain itu, unsur-unsur tidak terlihat lainnya juga menjadi penentu, seperti keberadaan “penguasa” laut dan adanya “sari’ah” baik yang berkonotasi baik dan buruk.

Kekuatan keyakinan terhadap Tuhan, dibarengi rasa aman yang berasal dari terlindunginya keluarga karena adanya ‘jaring pengaman’ yang ditawarkan bos di kala saat sulit, ditambah dengan sistem kekerabatan yang kuat, orang pulo, khususnya nelayan kongsi, menjadi sosok yang tidak *ngoyo*, tidak akan berpikir untuk mengeruk hasil laut sebelum yang lain melakukannya. Orang pulo sudah membuktikan keberadaan dirinya sejak beberapa generasi di atasnya. Laut di

Kepulauan Seribu, menurut orang pulo, adalah laut di mana pertumbuhan ikan jauh lebih cepat dibanding laut manapun di Indonesia. Oleh karena itu, tanpa mengurangi rasa cinta mereka pada keturunan yang nanti akan menikmati hasil laut, mereka juga yakin apa yang mereka bisa ambil saat ini adalah jatah mereka.

Hubungan antar kelompok kongsi dapat dikatakan sebagai hubungan yang berjalan seperti yang tercermin dalam hubungan antar warga. Keekerabatan antar orang pulo, terlihat sangat berpengaruh dalam hubungan antar kongsi ini. Meskipun sesekali beberapa anggota maupun bos kongsi kerap mencontohkan kejelekan kongsi lain sebagai ilustrasi kondisi yang ingin dihindarinya, namun demikian di laut, biasanya mereka akan saling membantu jika dibutuhkan. Sementara itu, keekerabatan orang pulo, membuat anggota kongsi melihat warga pulo sebagai keluarga besarnya. Meskipun ada pengaruh tradisi Mandar, misalnya, perilaku membagi-bagi ikan di saat mendarat, membuktikan eratnya rasa keekerabatan orang pulo. Hal ini juga tercermin dalam pengelolaan kongsi yang cenderung kekeluargaan. Sementara itu, hubungan kelompok-kelompok nelayan kongsi ini dengan pihak TNKS dan Pemkab, hanya sebatas pengetahuan tentang lembaga-lembaga itu sendiri. Maksudnya, jika ada program dari TNKS atau Pemkab yang melibatkan nelayan kongsi, maka mereka akan dapat berkomunikasi langsung. Di luar itu, mereka menjalani hidupnya sesuai dengan apa yang diyakininya dalam pengelolaan sumberdaya laut. Artinya, ada perbedaan persepsi dalam pengaturan sumberdaya laut antara nelayan kongsi dan pihak TNKS. Sementara itu, program APL yang dibuat oleh Pemkab cukup dipahami oleh nelayan dan dipatuhi sampai saat ini, karena pelaksananya adalah orang pulo sendiri.